

KAWAL PENCEGAHAN MALADMINISTRASI, OMBUDSMAN DAN ATR BPN TEKEN MOU

Kamis, 08 Maret 2018 - Rezky Septianto

Manokwari, Papua Barat - Ombudsman dan ATR BPN Teken MoU. Ombudsman RI dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) sepakat untuk meneken MoU atau kesepakatan kerjasama. Hal ini dilakukan untuk mengawal pencegahan maladministrasi yang terjadi di Kementerian ATR/BPN.

Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia, Papua Barat, Norbertus mengatakan, penandatanganan nota kerjasama ini dilakukan, sebagai upaya peningkatan pelayanan publik bersama kementerian ATR/BPN RI. "Penandatanganan MoU tersebut, dilakukan melalui video conference yang disaksikan seluruh instansi pemerintah provinsi di Indonesia," ujar Norbertus melalui siaran pers yang diterima Papua Barat, Kamis (8/3/2018). Hal ini disaksikan di ruang vip Polda Papua Barat, oleh Ombudsman RI Papua Barat bersama kementerian ATR BPN Kanwil Papua Barat didampingi asisten Ombudsman, Kepala BPN Manokwari dan para stafnya

Usai penandatanganan PKS tersebut, selanjutnya masing-masing provinsi sebagai bentuk tindak lanjut, akan berkoordinasi melaksanakan setiap poin kerjasama, khusus percepatan penyelesaian laporan. Berdasarkan data Ombudsman RI ungkap Norbertus, terkait maladministrasi kasus pertanahan, masuk dalam peringkat ke-5 dan cenderung mengalami peningkatan di setiap tahunnya. "Ruang lingkup penandatanganan PKS antara lain, percepatan penanganan pengaduan masyarakat, koordinasi perkembangan pelaksanaan rekomendasi Ombudsman RI dan pertukaran data informasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia," tuturnya.

Penulis : Kris Tanjung